

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(BRIDA) PROVINSI SULAWESI TENGAH**



BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

JL. Garuda No.30A PALU

Telp/ Fax :(0451) 8446226, 8888060

Website : www.bppid.sultengprov.go.id

Email : bridasulteng@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Tahun 2024
dan capain renstra 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 23

3.3 Program dan Kegiatan 23

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 33

BAB V PENUTUP 44

4.1 Kaidah Pelaksanaan 44

4.2 Rencana Tindak Lanjut 44

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah”** Tahun 2025 ini dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, yang memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD serta sebagai masukan dan evaluasi dalam pengendalian dan pengambil kebijakan dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada masa-masa yang akan datang.

Kiranya penyusunan dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja yang lebih baik bagi pegawai BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 Juli 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH I AMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan sesuai dengan kondisi wilayah atau kebijakan pusat/daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana kerja harus menyesuaikan dengan dokumen RKPD yang akan menjadi dokumen Renja OPD. Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja OPD dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan APBD (APBD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang–Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141).
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud

1. Pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Pedoman penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

Tujuan

Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penyusunan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Tahun 2024 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

- 4.1. Kaidah Pelaksanaan
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 didasarkan pada Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi/ memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud merupakan langkah yang berisikan program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan. Namun demikian, paradigma perneencanaan pembangunan tentunya tidak akan berjalan statis, namun

dinamis seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaannya.

Pelaksanaan Renja Bida Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 merencanakan ... Program dan ... kegiatan dan tahun 2023 mempunyai 2 program dan 12 Kegiatan 38 Sub Kegiatan dan Tahun 2024 mempunyai 2 Program Kegiatan Sub Kegiatan. Sedangkan Pencapaian target Renstra Bida Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya di jelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Brida Provinsi Sulawesi Tengah dan Pencapaian Renstra Brida Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
5.1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
5.1.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP BPPID	B	B						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan BPPID	2	2	2	2	100%	2	100	100%
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA BPPID dan Lap Hasil Koordinasi Peny RKA BPPID	2	2	2	2	100%	2	100	100%
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPID dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPID	2	2	2	2	100%	2	100	100%
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja BPPID	1	1	1	1	100%	1	100	100%
01.1.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Keuangan	100	100	2	2	100%	100	100	100%

		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	56	2	2	100%	56	2	100%
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		3 Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPID	1	1	1	1	100%	1	1	100%
01.1.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan BMD	1	1	1	1	100%	1	2	100%
		- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan hasil Penilaian BMD	1	1	1	1	100%	1	100	100%
01.1.05	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai IKM BRIDA	B	B						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	2	100%	2	100	100%
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110	110	110	110	100%	110	100	100%

01.1.06	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM BPPID	B	B						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	2	2	100%	1	3	300%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPPID	1	1	1	1	100%	1	1	100%
01.1.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
01.1.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%

[illegible]

5.05.02	Penelitian dan Pengembangan Daerah		Presentase Hasil Penelitian yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah	100	100						
02.1.03	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	1	1	100%	1	1	100%
02.1.03	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		1 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		3 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
02.1.02	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota	1	1	1	1	100%	1	1	100%

		1 Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		3 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2:01:04	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	57.98	57.98	1	1	100%	57.98	1	100%
		1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		2 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		3 Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	1	1	100%	1	1	100%

2.2 Analis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Brida Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun					Tahun			Tahun		
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Reformasi Birokrasi			60	62	64	66	68						
2	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	B	BB	A			
3	Indeks Inovasi Daerah			51,33	53,55	55,57	57,98	59,77	49,57	45,55	34,00			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

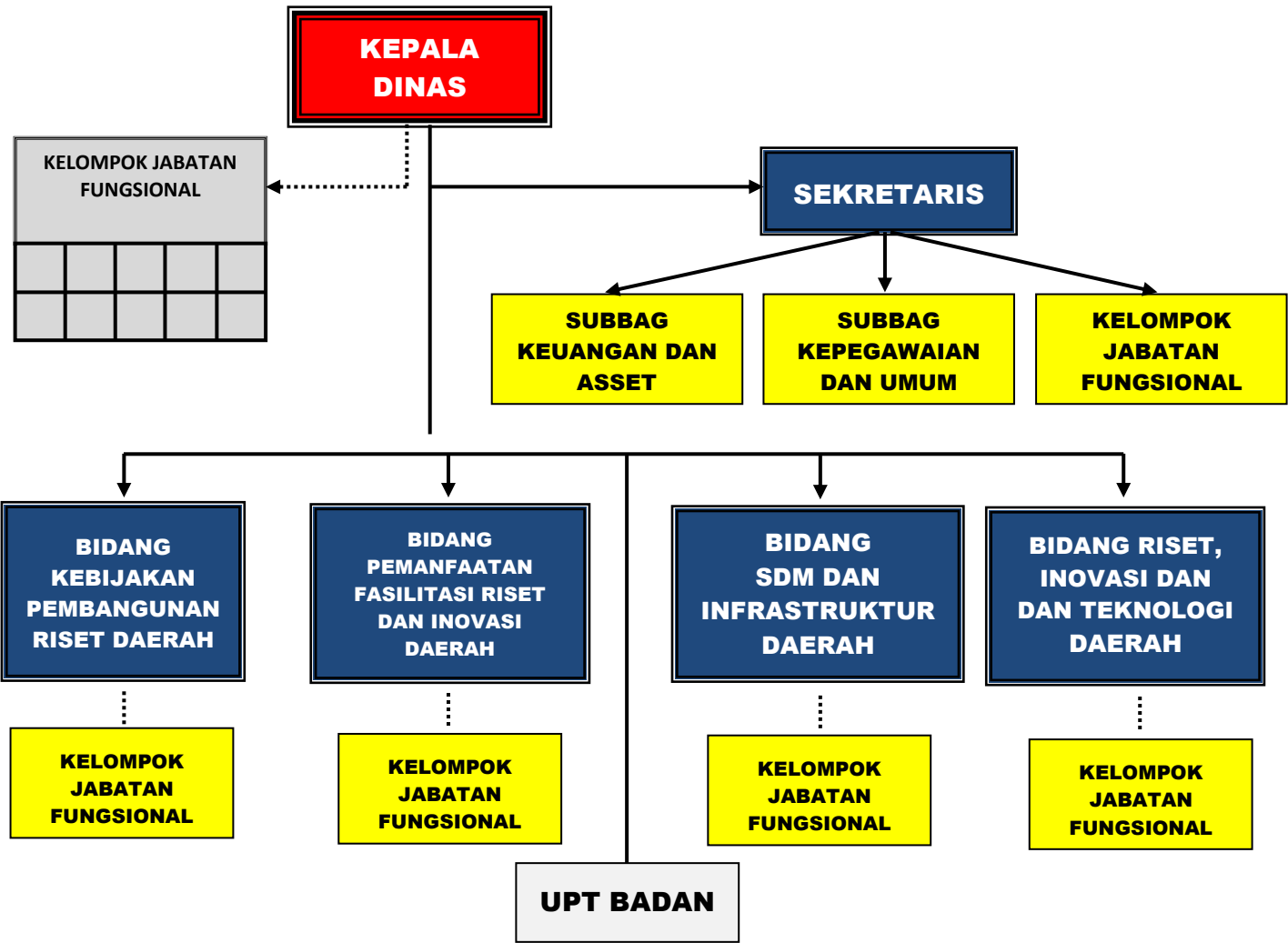
Guna memberikan gambaran secara singkat terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta susunan organisasi sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.
- 4) Bidang Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah.
- 5) Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah.
- 6) Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

c. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
4. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

d. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dapat berupa hambatan (kendala), kelemahan dan kekuatan organisasi.

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki oleh peneliti, sehingga tidak semua kegiatan litbang dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Masih belum tersedianya tenaga perekayasa;
3. Belum adanya sistem informasi (*linked database litbang*) kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan oleh PD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Litbang Kementerian yang ada di Sulawesi Tengah, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kajian;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah belum berbasis riset.
5. Mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis iptek;

6. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan;
7. Belum berkembangnya budaya Inovasi di kalangan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai peraturan daerah;
2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian.
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak hanya berujung pada kebijakan tetapi implementatif/terapan, agar hasil penelitian dapat langsung dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Selain beberapa isu tersebut, pengembangan Inovasi Perangkat Daerah juga menjadi perhatian BRIDA saat ini. Kebijakan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan public yang berbasis inovasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Periode/ Tahun : 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.007.997.153	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.007.997.153	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19.007.997.153	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19.007.997.153	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH)	68 Indeks	15.757.997.153,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH)	68 Indeks	15.757.997.153,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai Sakip	1.100.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai Sakip	1.100.000.000,00	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	650.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	650.000.000,00	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	
	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	

BAB II
RENJA Tahun 2025

2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Presentase Realisasi Keuangan	100%	9.862.720.542,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Presentase Realisasi Keuangan	100%	9.862.720.542,00	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58/bulan Orang/ Bula	8.224.650.542,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58/bulan Orang/ Bula	8.224.650.542,00	
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.138.070.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.138.070.000,00	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah			200.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah			200.000.000,00	
	1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai IKM BPPID	B Nilai IKM	400.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai IKM BPPID	B Nilai IKM	400.000.000,00	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000,00	
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	100.000.000,00	
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	100 Orang	150.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	100 Orang	150.000.000	
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai IKM BPPID	B Nilai IKM	1.150.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai IKM BPPID	B Nilai IKM	1.150.000.000,00	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	200.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	200.000.000,00	

BAB II
RENJA Tahun 2025

				Disediakan					Disediakan			
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah			1.900.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah			1.900.000.000,00	
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.900.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.900.000.000,00	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	473.021.611,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	473.021.611,00	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	73.021.611,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	73.021.611,00	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000,00	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Laporan	672.255.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Laporan	650.000.000,00	

BAB II
RENJA Tahun 2025

		Daerah		Pemerintahan Daerah			Daerah		Pemerintahan Daerah			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	22.255.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	22.255.000,00	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	450.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	450.000.000,00	
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	200.000.000,00	
2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	3.250.000.000,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	3.250.000.000,00	
1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	15 Dokumen	800.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	15 Dokumen	800.000.000,00	
	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	
2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Provinsi Sulawesi Tengah			550.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Provinsi Sulawesi Tengah			550.000.000,00	
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	300.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	300.000.000,00	
	2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	150.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	150.000.000,00	
	3	Penelitian dan	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	100.000.000,00	Penelitian dan	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	100.000.000,00	

BAB II

RENJA Tahun 2025

[illegible]

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Merupakan hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditunjukkan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam renja perangkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan Riset dan Inovasi yang berkualitas, bersinergi dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara Riset dan Inovasi Nasional dengan Riset dan Inovasi di tingkat daerah. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan Tema pembangunan adalah “Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing ”.dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
2. Peningkatan daya saing sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, dan pariwisata;
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang harus terus di kembangkan;
4. Harus di tingkatkan nya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing;
5. Menurunkan angka kemiskinan dan stunting;
6. Menyamaratakan potensi Sumber Daya Alam;
7. Memaksimalkan peran industri kecil maupun menengah;
8. Mengoptimalkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah “Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing ”.

pemerintah Sulawesi Tengah menetapkan 6 (enam) agenda prioritas pembangunan daerah provinsi sulawesi tengah yang telah selaras dengan 6 (enam) agenda prioritas nasional dalam RKP yakni:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
4. Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan.
6. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Brida Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Brida Provinsi Sulawesi Tenegah Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan). Adapun Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah.

Brida Provinsi Sulawesi Tengah harus dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan, Brida Provinsi Sulawesi Tengah juga harus mampu menjadi perangkat daerah yang menghasilkan riset dan inovasi yang baik sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sasaran Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
	Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Provinsi	Indeks Inovasi Daerah	59.77

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Brida Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Perangkat Daerah

: Badan Riset dan Inovasi Daerah

Periode / Tahun

: 2025

Prakiraan Maju

: 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19.007.997.153				19.705.000.011
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	68 Indeks	15.757.997.153	APBD		68 Indeks	16.290.000.011
5 05 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	B Nilai Sakip	717.200.000	APBD		80/A	1.140.000.000
5 05 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Dokumen	1.100.000.000,00	APBD		1 Dokumen	210.000.000
5 05 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	660.000.000

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
5 05 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Laporan	650.000.000,00	APBD		1 Laporan	160.000.000
5 05 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	150.000.000,00	APBD		1 Laporan	110.000.000
5 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Keuangan	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100%	9.862.720.542,00	APBD		100%	10.210.000.000
5 05 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	58/bulan Orang/ Bula	8.224.650.542,00	APBD		58/bulan Orang/ Bula	8.500.000.000
5 05 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	1.138.070.000,00	APBD		1 Dokumen	1.200.000.000

5 05 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	500.000.000,00	APBD		1 Laporan	510.000.000
5 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		200.000.000,00	APBD			210.000.000
5 05 01 1.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	200.000.000,00	APBD		1 Laporan	210.000.000
5 05 01 1.05	Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah	Nilai IKM BPPID	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	B Nilai IKM	400.000.000,00	APBD		B Nilai IKM	430.000.000
5 05 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	160.000.000
5 05 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	5 Orang	100.000.000,00	APBD		5 Orang	110.000.000

5 05 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	100 Orang	150.000.000	APBD		100 Orang	160.000.000
5 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks reformasi Hukum Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	B Nilai IKM	1.150.000.000,00	APBD		B Nilai IKM	1.200.000.000
5 05 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Paket	200.000.000,00	APBD		1 Paket	210.000.000
5 05 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Paket	200.000.000,00	APBD		1 Paket	210.000.000
5 05 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	160.000.000
5 05 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Paket	100.000.000,00	APBD		1 Paket	110.000.000

5 05 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	500.000.000,00	APBD		1 Laporan	510.000.000
5 05 01 1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		1.900.000.000,00	APBD			2.000.000.000
5 05 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Unit Bangunan	1.900.000.000,00	APBD		1 Unit Bangunan	2.000.000.000
5 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Laporan	473.021.611,00	APBD		1 Laporan	400.000.011
5 05 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	73.021.611,00	APBD		1 Laporan	80.000.000
5 05 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	200.000.000,00	APBD		1 Laporan	210.000.000

5 05 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	100.000.000,00	APBD		1 Laporan	11
5 05 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	100.000.000,00	APBD		1 Laporan	110.000.000
5 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Laporan	672.255.000,00	APBD		1 Laporan	800.000.000
5 05 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	30 Unit	22.255.000,00	APBD			30.000.000,00

5 05 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	10 Unit	450.000.000,00	APBD		10 Unit	460.000.000
5 05 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	25 Unit	200.000.000,00	APBD		25 Unit	210.000.000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100%	3.250.000.000,00	APBD		100%	3.415.000.000
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Kebijakan Pembangunan Riset Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	15 Dokumen	800.000.000,00	APBD		15 Dokumen	850.000.000
5 05 02 1.01 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1 Laporan	800.000.000,00	APBD			850.000.000

5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan / Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi		Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		550.000.000,00	APBD			620.000.000
5 05 02 1.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		1 Dokumen	350.000.000
5 05 02 1.02 0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD		1 Dokumen	160.000.000
5 05 02 1.02 0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1 Dokumen	110.000.000
5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / SDM dan Infrastruktur Riset	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kot	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	13 Dokumen	600.000.000,00	APBD		13 Dokumen	620.000.000
5 05 02 1.03 0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	310.000.000

5 05 02 1.03 0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		1 Dokumen	310.000.000
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Riset, Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	5 Dokumen	1.300.000.000,00	APBD		5 Dokumen	1.325.000.000
5 05 02 1.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Dokumen	800.000.000,000	APBD		1 Dokumen	810.000.000
5 05 02 1.04 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	250.000.000,00	APBD		1 Laporan	255.000.000
5 05 02 1.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Provinsi Sulawesi Tengah, Mantikulore, Tanamodimdi	1 Laporan	250.000.000,00	APBD		1 Laporan	260.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsi Brista maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan perencanaan. Total program, kegiatan dan anggaran Brista Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Usulan Program Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
					Tahun 2025			
					Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				19.007.997.153		
	5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		68 Indeks	15.757.997.153		
	5 05 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		B Nilai Sakip	717.200.000		
	5 05 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1.100.000.000,00		
	5 05 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	200.000.000,00		

	5 05 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	650.000.000,00		
	5 05 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	150.000.000,00		
	5 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Keuangan		100%	9.862.720.542,00		
	5 05 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		58/bulan Orang/ Bula	8.224.650.542,00		
	5 05 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1.138.070.000,00		
	5 05 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	500.000.000,00		

			Tahun SKPD					
	5 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				200.000.000,00		
	5 05 01 1.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	200.000.000,00		
	5 05 01 1.05	Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah	Nilai IKM BPPID		B Nilai IKM	400.000.000,00		
	5 05 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	150.000.000,00		
	5 05 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiha		5 Orang	100.000.000,00		

	5 05 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga		100 Orang	150.000.000		
	5 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks reformasi Hukum Perangkat Daerah		B Nilai IKM	1.150.000.000,00		
	5 05 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00		
	5 05 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00		
	5 05 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	150.000.000,00		
	5 05 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka		1 Paket	100.000.000,00		
	5 05 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	500.000.000,00		

	5 05 01 1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.900.000.000,00		
	5 05 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit Bangunan	1.900.000.000,00		
	5 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	473.021.611,00		
	5 05 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	73.021.611,00		
	5 05 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	200.000.000,00		
	5 05 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	100.000.000,00		

	5 05 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	100.000.000,00		
	5 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	672.255.000,00		
	5 05 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan			22.255.000,00		
	5 05 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	450.000.000,00		
	5 05 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	200.000.000,00		

	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		100%	3.250.000.000,00		
	5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan / Kebijakan Pembangunan Riset Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan		15 Dokumen	800.000.000,00		
	5 05 02 1.01 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	800.000.000,00		
	5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan / Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi				550.000.000,00		
	5 05 02 1.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 Dokumen	300.000.000,00		

	5 05 02 1.02 0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		1 Dokumen	150.000.000,00		
	5 05 02 1.02 0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		1 Dokumen	100.000.000,00		
	5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / SDM dan Infrastruktur Riset	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kot		13 Dokumen	600.000.000,00		
	5 05 02 1.03 0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 Dokumen	300.000.000		
	5 05 02 1.03 0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	300.000.000,00		
	5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi / Riset, Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi		5 Dokumen	1.300.000.000,00		

			Sulawesi Tengah					
	5 05 02 1.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 Dokumen	800.000.000,000		
	5 05 02 1.04 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 Laporan	250.000.000,00		
	5 05 02 1.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	250.000.000,00		

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat beberapa Kerja sama yang akan dilaksanakan antara Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pihak-pihak terkait antara lain :

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pemerintah Kabupaten Donggala yang akan dilaksanakan di Donggala pada Triwulan II TA. 2025;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kordinator dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Komunikasi Informasi.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi anatar RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(B R I D A)

JL. GARUDA NOMOR 30A Telp./Fax. (0451) 426810 - 457103 PALU 94111
Website : www.balitbangda.sultengprov.go.id Email : balitbangda@sulteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :

T E N T A N G
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
 - b. bahwa RENJA Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 - 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

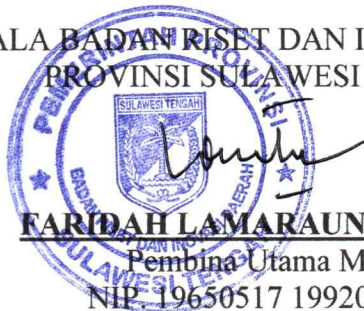
MENETAPKAN

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, mencakup Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juli 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006